**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN PROPOSISI**

* 1. **Tinjauan Pustaka**

Pertama kali kata “reformasi” muncul pada abad ke – 16 dimana di Eropa Barat sedang terjadi religius revolution yang dilancarkan oleh kalangan yang menamakan dirinya kelompok *“protestant”* terhadap gereja katholik dan kemudian menjalar ke berbagai penjuru dunia. Kata reformasi kemudian digunakan sebagai sebutan bagi upaya kolektif dan korektif terhadap penyimpangan, ketimpangan, ketidak-adilan dan tindakan penguasa yang bertentangan dengan akal sehat yang dilancarkan oleh kelompok atau pihak yang merasa tertindas. Menurut *Encylopedia Britanicaa,*  reformasi adalah “gerakan pembaharuan yang dilancarkan oleh kekuatan tertentu didalam masyarakat sebagai reaksi atau koreksi total dan fundamental terhadap kekuasaan yang sedang berjalan berdasarkan pertimbangan moral, politik, ekonomi dan doktrinal.

Kata “*reform”* menurut *Oxford Advanced learner’s Dictionary* **(1978)** *make or become better by removing obstacle or putting right what is bad or wrong*. Rumusan ini menggambarkan bahwa pada dasarnya reformasi adalah mengubah atau membuat sesuatu menjadi lebih baik dari yang sudah ada. Sedangkan kata birokrasi berasal dari dua akar kata, yaitu *bureau* (kain penutup meja) dan *cracy, ruler* (pengatur). Sekurang – kurangnya ada tiga macam birokrasi, yaitu: *pertama* birokrasi diartikan sebagai “*goverment by bureau”*  yaitu pemerintahan biro oleh pegawai yang diangkat oleh pemegang kekuasaan, pemerintah atau pihak atasan dalam sebuah organisasi formal, baik publik maupun privat; pemerintahan birokratik adalah pemerintahan tanpa partisipasi warga masyarakat (pemangku kepentingan dan masyarakat konsumen). *Kedua,* birokrasi diartikan sebagi sifat atau perilaku pemerintahan, yaitu: sifat kaku, macet, berbelit – belit, berliku – liku dan segala tuduhan/ stigma negatif terhadap birokrasi pemerintahan. Ketiga, birokrasi sebagai tipe ideal sebuah organisasi yang bermula dari teori **Max Weber.**

Dalam bahasa Inggris secara umum birokrasi disebut dengan *“Civil Service”*. Selain itu juga sering disebut dengan *public sector , public service* atau *public administration* **(Setiyono, 2004). Phlip J. Copper (2001),** mengidentifikasi ada 8 (delapan) hal yang dituntut dalam penyelenggaraan pemerintahan di abad XXI, yaitu *diversity, accountability, civil society, privatization, democration, desentralization, re – engineering,* dan *the empowering effect of highly technology.* Apabila dicermati, kedelapan hal tersebut sebenernya merupakan tuntutan terhadap kondisi birokrasi dimasa depan atau boleh dikatakan merupakan tujuan reformasi birokrasi yaitu mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance)*. **Michael Dugget, Director General HAS dalam Rewansyah (2009:123)** mengemukakan pengertian Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

**Reformasi Birokrasi adalah proses yang dilakukan secara kontinyu untuk mendesain ulang birokrasi, yang berada dilingkungan pemerintah dan partai politik sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna baik ditinjau dari segi hukum maupun politik.**

Dalam tulisan **Jamiat Akadol** dalam tulisannya dengan topik “*Bureaucracy Reform`: A Dilemmatic Bureaucratic Law Politic*” mengemukakan:

*Bureaucracy reform is basically an effort to renew and make fundamental changes toward the government system, especially when dealing with institutional aspects (organization), business process, and human apparatus. Therefore, bureaucracy reform is a strategic step to develop more empowered and effective apparatus in performing the general duties in the governmental sectors and national development. Talking about the bureaucracy reform is similar to putting efforts on implementing system and bureaucratic behaviors restructuring and repositioning to achieve good governance. As a result, the reform is aimed to create a professional bureaucracy system and develop adaptive, integrity, efficient, and clean government officers so that they can serve the public neutrally, properly, and with high level of dedication, by holding the basic values and ethic codes of the nation’s apparatus.*

Peneliti menyimpulkan mengenai tulisan diatas bahwa reformasi birokrasi memang perlu ada karena dengan adanya reformasi birokrasi dapat merubah sistem pemerintahan yang tentunya kearah yang lebih baik dan meningkatkan rasa percaya masyarakat serta pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bersifat netral dalam artian tidak melihat dari aspek – aspek tertentu.

Faktor sukses terpenting reformasi birokrasi:

1. Komitmen pimpinan

Karena masih kentalnya budaya paternalistik dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

1. Kemauan diri sendiri

Selain komitmen pimpinan, perlu kemauan dan keikhlasan penyelenggara pemerintahan (birokrasi) untuk mereformasi diri sendiri.

1. Kesepahaman

Ada persamaan persepsi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi terutama dari birokrat sendiri, sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat yang menghambat reformasi.

1. Konsistensi

Reformasi birokrasi harus dilaksanakan berkelanjutan dan konsistensi, sehingga perlu ketaatan perencanaan dan pelaksanaan

Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan efektivitas, efisien dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi berarti:

1. Perubahan cara berpikir (pola pikir, pola sikap dan pola tindak)
2. Perubahan penguasa menjadi pelayan
3. Mendahulukan peranan dari wewenang
4. Tidak berpikir hasil produksi tetapi hasil akhir
5. Perubahan manajemen kinerja
6. Pantau percontohan reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, transparan daan profesional, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) melalui
7. Penataan lembaga
8. Penataan ketatalaksanaan
9. Penata sumber daya manyusia aparatur
10. Akuntabilitas
11. Pelayanan dan kualitas pelayanan

Tujuan reformasi birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (*public trust building*) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan adalah manajemen kepercayaan. Sulit bagi pemerintah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan tanpa adanya kepercayaan masyarakat. Citra negatif birokrasi adalah lamban, berbelit – belit, suka pungli dan menunda – nunda pekerjaan, bahkan minta dilayani, bukannya melayani masyarakat. Visi reformasi birokrasi adalah terwujudnya aparatur negara yang profesional dan kepemerintahan yang baik (*Good Governance)*. Tolak ukur kepemerintahan yang baik menurut **UNDP** adalah pelayanan publik yang efisien, peradilan yang handal dan aparatur pemerintahan bertanggungjawab kepada publiknya. **Menurut Efendi (2005),** *Good Governance* tak lain dari pelayanan publik yang prima dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Misi reformasi birokrasi adalah mengubah pola/ alam pikiran (*mindset)*, polabudaya *(cultural set)*, dan sistem tata kelola pemerintah.

Konsep berikutnya adalah Good Governance yang peneliti kutip Dalam jurnal karya **Arpi R. Rondonuwu (2015)** dengan topik **Implementasi *Good Governance* Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan**.

Governance merupakan kerangka konsep ‘filosofis’, ‘teoritis’ dan ‘analitis’ yang sangat berguna sebagai landasan untuk membenahi idiologi, paradigma, kultur dan manajemen kepemerintahan (manajemen publik). Konsep governance ini bukan hanya di tujukan sebatas orientasi internal organisatoris, melainkan juga pada aspek eksternal, *output*, *outcome* dan *impact*, yaitu upaya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan dan adil berkemakmuran bagi rakyatnya sebagai parameter dari penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki kinerja tinggi. Disamping itu pula gagasan ini tentu juga bersinggungan dengan keinginan untuk meningkatkan daya saing dan inovasi aparatur publik baik di tingkat lokal, nasional maupun ditingkat global. Tulisan ini merupakan refleksi fakta *Governance*, yang diterjemahkan menjadi tata pemerintahan adalah penggunaan wewenang ekonomi, politik dan administrasi guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat **(Dwi yanto, 2003: 45)**.

Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok – kelompok masyarakat Mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan – perbedaan diantara mereka. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam konteks pembangunan, definisi *governance* adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan, sehingga *good governance*, dengan demikian, adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang substansial dan penerapannya untuk menunjang pembangunan yang stabil dengan syarat utama efisien dan relatif merata.

*Good* dalam *good governance* mengandung dua pengertian yaitu: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional), kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut **(Sedarmayanti, 2003:6).**

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi kepemerintahan (governance) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintahan dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan lembaga Swadaya masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya.

**Lembaga Administrasi Negara (2000)** menyimpulkan definisi wujud good governance adalah sebagai berikut:

**Wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain – domain negara, sektor swasta dan masyarakat.**

Pada dasarnya unsur unsur dalam kepemerintahan dapat dikelompokan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Negara/ pemerintahan: Konsepsi kepemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum kondusif.
2. Sektor swasta: Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi termasuk sektor informal. Sektor swasta menciptakan pekerjaan dan pendapatan.
3. Masyarakat madani: Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah – tengah antara pemerintah dan perorangan yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

Hubungan diantara negara, sektor swasta dan masyarakat adalah bahwa negara, sebagai salah satu *governance*, didalamnya termasuk lembaga – lembaga politik dan lembaga – lembaga sektor publik. Sektor swasta meliputi perusahaan swasta yang bergerak diberbagai bidang sektor informal lain dipasar. Ada anggapan bahwa sektor swasta adalah bagian dari masyarakat. Namun demikian, sektor swasta dapat dibedakan dengan masyarakat karena sektor swasta mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, politik dan ekonomi sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan itu sendiri. Sementara itu, masyarakat *(society)* terdiri dari individual ataupun kelompok (baik yang terorganisasi maupun tidak) yang berinteraksi secara sosial, politik, ekonomi dengan aturan formal ataupun tidak formal. *Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan lain- lain.

*The Good Governance in the Public Sector defines effective governance in the public sector as those principles that encourages better decision making and the efficient use of resources and strengthens accountability for the stewardship of those resources. Therefore, effective governance is characterized by robust scrutiny, which provides important pressures for improving public sector performance, gaining transparency and tackling corruption. Effective governance can improve management, leading to more effective implementation of the chosen interventions, better service delivery and operation, and, ultimately, better outcomes.*

Ungkapan diatas peneliti kutip dari hasil penelitian sebelumnya dalam tulisan **Carlos et, al (2014)** dengan topik *Implementing Good Governance Principles for the Public Sector in Information Technology Governance Framework*. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa good governance ditandai dengan pengawasan yang kuat, meningkatkan kinerja serta sikap transparansi untuk menghindari adanya korupsi sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun menjadi lebih baik, efektif dan efesien.

**Sarundajang** dalam bukunya Birokrasi Dalam Otonomi Daerah **(Sarundajang, 2005:152)** menjelaskan bahwatata pemerintahan yang baik atau *Good Governance* dewasa ini sedang menjadi acuandalam mencari perbaikan organisasi sesuaidengan tuntutan reformasi. Tatapemerintahan yang baik merupakan sebuah konsep yang akhir-akhir ini dipergunakan secara teratur dalam ilmu politik, terutama ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Konsep itu lahir sejalan dengan konsep – konsep dan terminologi demokrasi, masyarakat madani (*civil society*), partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Sarundajang pula merumuskan bahwa istilah *governance* menunjukkan suatu proses di mana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyatnya.

Membangun *Good Governance* adalah mengubah cara kerja *state*, membuat pemerintah *accountable*, dan membangun pelaku-pelaku di luar negara cakap untuk ikut berperan membuat sistem baru yang bermanfaat secara umum. Dalam konteks ini , tidak ada satu tujuan pembangunan yang dapat diwujudkan dengan baik hanya dengan mengubah karakteristik dan cara kerja institusi negara dan pemerintah. Harus kita ingat, untuk mengakomodasi keragaman, *goodgovernance* juga harus menjangkau berbagai tingkat wilayah politik. Karena itu, membangun *good governance* adalah proyek sosial yang besar. Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan secara bertahap. Untuk Indonesia, fleksibilitas dalam memahami konsep ini diperlukan agar dapat menangani realitas yang ada. **UNDP** dalam **Syafri “Studi tentang Administrasi Publik” (2012:177)** mengajukan beberapa karakteristik *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. ***Participation.* Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermadiasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstuktif.**
2. ***Rule of low*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.**
3. ***Transparancy*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau**
4. ***Responsiveness*. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder.***
5. ***Consesus orientation. Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.**
6. ***Equity*. Semua warga negara, baik laki – laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.**
7. ***Effectiveness dan efficiency*. Proses lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.**
8. ***Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat *(civil society)* bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholder. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, misalnya apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi.**
9. ***Strategic vision.* Para pemimpin dan publik harus mempunyai persfective good governance dan pengembangan manusia yang luas, serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.**

Terwujudnya *Good governance* merujuk pada akuntabilitas karena akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat. Secara historis penggunaan istilah akuntabilitas mulai dikenal pada ke – 13. Konsep akuntabilitas tersebut kemudian dimaknai sebagai pertangggungjawaban terhadap kegiatan yang dilakukan oleh aparatur pemerintahan sesuai dengan tugas yang telah diamanatkan kepada bersangkutan. Akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai sengan norma dan nilai – nilai yang dianut oleh rakyat dan apakah pelayanan publik tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan rakyat yang sesungguhnya. Konsep akuntabilitas publik ini, senantiasa disandingkan dengan penyelenggaraan pemerintahan, baik pada lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Hal ini dapat dipahami, mengingat penyelenggaraan pemerintahan memang banyak diperankan oleh ketiga kelembagaan tersebut, sehinggga tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan pun akan sangat tergantung kepada bagaimana ketiga lembaga tersebut mampu menjalankan amanatnya sesuai dengan tugas masing – masing.

Secara etimologis istilah akuntabilitas berasal dari bahasa latin: *accomptare* yang mengandung arti mempertanggungjawabkan. Adapun *accomptare* sendiri merupakan bentuk kata dasar dari *computare* yang berarti memperhitungkan, yang juga berasal dari kata *putare* sendiri tidak pernah digunakan dalam bahasa Inggris secara sempit, tetapi dikaitkan dengan berbagai istilah dan ungkapan seperti istilah keterbukaan (*openness*), transparansi (*transparency)* aksesibilitas (*accassibility*), dan berhubungan kembali dengan publik (*reconnecting with the public*).

**Day dan Klein dalam Peters (2010: 265)** mendefinisikan bahwa akuntabilitas merupakan mekanisme untuk menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik. Namun, menurut **Osborne (2010: 430),** akuntabilitas lebih dari sekadar menjalankan pengendalian terhadap organisasi publik dan program publik, akuntabilitas juga merupakan sarana yang memandu bagi organiasi dalam usahanya untuk meningkatkan efektivitas dan efesiensi program.

*Accountability in this very broad sense is basically an evaluative concept that is used to positively qualify a state of affairs or the performance of an actor. It comes close to ‘responsiveness ’ and ‘ a sense of responsibility ’ , a willingness to act in a transparent, fair and equitable way. Accountability in this broad sense is an essentially contested and contestable concept, because there is no general consensus about the standards for ac-countable behaviour; in addition, they differ from role to role, time to time, place to place, and from speaker to speaker. On the other side of the Atlantic, in British, Australian and continental European scholarly debates, accountability is often used in a much more narrow, descriptive sense. Accountability is seen as a social ‘ mechanism ’ as an institutional relation or arrangement in which an actor can be held to account by a forum* **( Day and Klein 1987; Mulgan 2003 )***. Here the locus of accountability studies is not the behaviour of public agents, but the way in which these institutional arrangements operate. And the focus of accountability studies is not whether the agents have acted in an accountable way, but whether they are or can be held accountable ex post factoby accountability forums. Both concepts, the broad one, in which accountability is seen as a personal or organizational virtue, and the narrow one, in which accountability is defined as a social mechanism, are very useful for the study of, and the debate about, democratic governance. However, they should be distinguished, since they address different sorts of issues and imply very different sorts of standards and analytical dimensions. In this paper we will focus on the narrow concept of accountability, using the* **Bovens 2006** *definition: ‘ a relationship between an actor and a forum, in which the actor has an obligation to explain and justify his or her conduct, the forum can pose questions and pass judgment, and the actor may face consequences ’ .*

Ungkapan dari **Bovens (2006)** dapat disimpulkan bahwa dengan adanya akuntabilitas, tata kepemerintahan akan lebih baik yakni adil, transparan dan merata. Serta akuntabilitas ini menjadikan pondasi pada pelaksana program – program yang dilaksanakan oleh pejabat publik karena pejabat tersebut harus bertanggung jawab mengenai apa yang dilaksanakannya dan akuntabilitas menjadi pengendali agar program – program itu tetap efektif dan efesien.

Dengan bahasa lain, akuntabilitas bersentuhan dengan masalah pelaporan dan pertanggungjawaban, baik secara individu, kelompok maupun instuisi. Oleh sebab itu, akuntabilitas sering digambarkan sebagai hubungan antara unsur, elemen atau bagian – bagian dalam suatu organisasi terkait dengan bidang tugas yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

Akuntabilitas publik pada hakikatnya merupakan sebuah konsep etika yang sangat inheren dengan administrasi publik dan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik administrasi publik. Ini karena publik menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan aktivitas rutin yang dikerjakan oleh organisasi sektor publik. Bentuk perhatian ini merupakan konsekuensi yang wajar dari pajak dan retribusi yang telah dibayarkan masyarakat. Dinegara Demokrasi seperti Indonesia, organisasi publik dituntut untuk akuntabel terhadap seluruh tindakan-tindakan yang telah dilakukannya.

**Henry (2007:109)** mendefinisikan Akuntabilitas sebagai berikut:

**Bahwa akuntabilitas merupakan refleksi dari pemerintah yang memiliki misi yang jelas dan menarik serta berfokus pada kebutuhan masyarakat. Pemerintah hendaknya meningkatkan akuntabilitasnya terhadap kepentingan publik dalam konteks hukum, komunitas,dan nilai bersama.**

Dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan maupun program dengan bertujuan agar pelaksanan tersebut tetap efektif dan efesien. Berdasarkan reverensi jurnal penelitian seblumnya karya **Kristian Widya Wicaksono (2015)** dengan topik **Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik**, akuntabilitas memiliki beberapa dimensi. **Koppel dalam Aman, Al-Shbail, dan Mohammed (2013: 17-18)** menjelaskan bahwa akuntabilitas memiliki sejumlah dimensi, di antaranya: transparansi, pertanggungjawaban, pengendalian, tanggung jawab, dan responsivitas.

1. **Transparansi**, yang merujuk tentang informasi atas kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil yang dicapai. Di sini transparansi memiliki peran penting dalam pengembangan akuntabilitas publik karena dengan mewujudkan transparansi maka pemerintah setidak-tidaknya telah mempermudah warga untuk mengetahui tindakannya, rasionalitas dari tindakan itu, serta membandingkannya dengan sistem nilai yang ada. **Prat (2007)** dan **Garet, V (2008)** dalam **Mattoasi dan Syamsudin (2015: 44)** menegaskan transparansi perlu dilakukan untuk kepentingan organisasi dan masyarakat, agar tidak menimbulkan efek negatif terhadap pemerintahan yang dijalankan. Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh parapengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan. Menurut **Siregar (2001)** dalam **Sitnakala dan Batkunde (2007:28)**, transparansi mengandung prinsip yaitu 1) mudah dipahami oleh masyarakat, 2) dapat diterima oleh masyarakat, dan 3) dikelola secara terbuka dan dipertanggung jawabkan. Dengan demikian dapat dimengerti bahwa transparansi merupakan suatu kewajiban pemerintah daerah dalam memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami keberhasilan pemerintah dalam waktu tertentu. Transparansi akan terlaksana dengan baik jika setiap informasi yang dimiliki pemerintah harus diungkap dan bukan sebaliknya dengan cara asimetri informasi.

1. **Pertanggungjawaban**, yang merujuk pada kegiatan individu atau organisasi publik untuk memastikan sesuai atau tidak serta mampu bertanggungjawab atas yang dilakukannya.

**Sugeng Istanto (2009)** mengemukakan definisi pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya. Konsep pertanggungjawaban dapat dijelasakan dari adanya wewenang. Wewenang di sini berarti kekuasaan yang sah.

1. **Pengendalian**, yang merujuk pada situasi bahwa organisasi melakukan secara tepat apa yang menjadi perintah utamanya.

Pengendalian adalah proses memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut diselesaikan seperti yang telah direncanakan dan proses mengkoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Dasar pengendalian dapat dilihat dari fungsi pengawasan. **Earl P. Strong** dalam **Hasibuan (2001:242)** mendefinisikan pengendalian sebagai proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan – ketetapan dalam rencana. Fungsi ini diperlukan untuk menjamin terlaksananya berbagai kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Dalam dimensi pengendalian, pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi publik dapat memastikan bahwa organisasi publik tersebut tetap berjalan pada jalur yang semestinya. Pengendalian ini apabila dilakukan dengan konsisten maka akan membantu untuk mengurangi bahkan meniadakan tumpang tindih kewenangan, kebijakan, dan program antar organisasi publik. Sebagai implikasinya maka kualitas koordinasi antar organisasi publik dapat semakin meningkat.

1. **Tanggung jawab**, merujuk pada individu atau organisasi untuk patuh pada hukum yang berlaku serta mampu menanggung apabila terjadi sesuatu.

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** tanggung jawab adalahkewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut.

1. **Responsivitas**, yang merujuk pada organisasi menaruh minat dan berupaya untuk memenuhi harapan substantif para pemangku kepentingan yang bentuknya berupa artikulasi permintaan dan kebutuhan.

Menurut **Dwiyanto (2006:51)** responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuanya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas memiliki persamaan arti dengan daya tanggap. Responsivitas juga harus dimiliki oleh pemerintah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian responsivitas dapat diartikan sebagai daya tanggap pemerintah yang ditunjukan melalui kepekaan dan kemampuan dalam menghadapi keluhan dan kebutuhan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Kelima dimensi inilah yang membantu mengukur sejauh mana sebuah organisasi pada sektor publik mampu menjalankan akuntabilitasnya. Topik peneliti pada penelitian kali ini adalah akuntabilitas publik dalam pengelolaan taman, karena itu peneliti ingin tau bagaimana tanggungjawab publiknya. Pada dasarnya peran akuntabilitas publik tidak hanya dari satu aspek, oleh karena itu akuntabilitas publik memiliki beberapa jenis yang sudah peneliti kutip dari **Satibi (2012)** dalam judul buku **Manajemen Publik Dalam Perspektif Teoritik dan Empirik.**

Secara substantif akuntabilitas publik jelas harus dilakukan oleh organisasi sektor publik yang secara operasional membutuhkan berbagai dimensi strategis. Untuk memahami akuntabilitas publik secara komprehensif, dibutuhkan adanya pemahaman terhadap jenis atau tipe akuntabilitas publik. Sejalan dengan konteks tersebut, **Ellwood** dalam **Widodo (2007)** menjelaskan empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

1. **Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum**

**Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitan hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dan penggunaan sumber dana publik.**

1. **Akuntabilitas Proses**

**Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalan melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasi melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif, dan murah biaya. Pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan akuntabilitas proses dapat dilakukan, misalnya dengan memriksa ada tidaknya mark up dan pungutan – pengutan lain diluar yang ditetapkan, serta sumber sumber inefesiensi dan pemborosan yang menyebabkan mahalnya biaya pelayanan publik dan kelambanan dalam pelayanan.**

1. **Akuntabilitas Program**

**Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal**

1. **Akuntabilitas Kebijakan**

**Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan, baik pusat maupun daerah, atas kebijakan – kebijakan yang diambil pemerintahan terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.**

Akuntabilitas sendiri merupakan sebuah konsep yang memfokuskan pada kapasitas organisasi sektor publik untuk memberikan jawaban terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi tersebut. Dalam penegasan yang lebih spesifik, akuntabilitas merupakan kemampuan organisasi sektor publik dalam memberikan penjelasan atas tindakan – tindakan yang dilakukannya terutama terhadap pihak-pihak yang dalam sistem politik telah diberikan kewenangan untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap organisasi publik tersebut **(Starling, 2008: 169).**

**Gray *et al.* (2006)** dalam tulisan **Transformasi Nilai Budaya Lokal Dalam Membangun Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik** karya **Fransiskus** dan **Fransiskus (2014)** memahami akuntabilitas sebagai hak suatu masyarakat yang timbul karena adanya hubungan antara organisasi dan masyarakat. Pengertian ini mengangkat akuntabilitas pada tingkat yang lebih luas bahwa akuntabilitas bukan hanya milik individu atau organisasi saja tetapi menjadi hak dan milik masyarakat umum yang mempunyai keterkaitan atau keterpautan dengan individu atau organisasi tersebut. Lebih lanjut **Gray *et al.* (2006)** menyatakan konsep akuntabilitas ini berada dalam kerangka tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi sebagai bagian dari komunitas masyarakat luas. Pandangan **Sinclair (1995) dan Gray *etal.* (2006)** menunjukkan akuntabilitas harus disiapkan oleh subyek yang melakukan suatu aktivitas kepada publik agar individu atau organisasi mendapat kepercayaan publik atau dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan organisasi yang bersangkutan.

Organisasi adalah sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu dapat dikatakan organisasi adalah wadah kegiatan daripada orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya mencapai tujuan. Dalam wadah kegiatan itu setiap orang harus jelas tugas,wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya. Pengertian yang demikian disebut organisasi yang bersifat ’’statis’’, karena sekedar hanya melihat kepada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “dinamis”. Dalam pengertian ini organisasi dilihat daripada sudut dinamikanya, aktifitas/tindakan daripada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi itu,baik yang bersifat formal maupun yang bersifat informal.

Menurut **Mc. Farland** dalam **Soewarno Handayaningrat, “Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen” (1981:42)** Organisasi didefinisikan sebagai berikut:

An organization is a identifable group of people contributing theis efforts toward the atainment of goals. **(organisasi adalah suatu kelompok manusia yang dapat dikenal yang menyumbangkan usahanya terhadap tercapainya suatu tujuan).**

Menurut **Dimock** dalam **Soewarno Handayaningrat, “Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara dan Manajemen” (1981:42)** Organisasi didefinisikan sebagai berikut:

*Organization is the systematic bringing together of interdependent part to form a unfield whole through which authority, coordination and control may be exercise to achive a given purpose”* **( organisasi adalah perpaduan secara sistematis daripada bagian – bagian yang saling ketergantungan/berkaitan untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang ditentukan).**

Menyangkut hal itu pengertian organisasi juga merupakan sekumpulan orang – orang yang disusun dalam kelompok – kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, Organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih, atau organisasi adalah setiap bentuk kerjasama untuk pencapaian tujuan bersama, organisasi adalah struktur pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antara sekelompok orang pemegang posisi yang bekerjasama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. **Bernard (1938)** mengatakan bahwa organisasi adalah sistem kerjasama antara dua orang atau lebih (*Define organization as a system ofcooperative of two or more persons)* yang sama – sama memiliki visi dan misi yang sama.

Organisasi terbentuk karna adanya tujuan, untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut organisasi pasti memiliki sebuah perencanaan yang berguna untuk menentukan apa langkah – langkah dalam pencapian tujuan organisasi itu sendiri. Perencanaan dapat berarti hal yang berbeda buat orang yang berbeda. Bagi orang yang memiliki profesi tertentu, perencanaan dapat berarti suatu kegiatan khusus yang memerlukan keahlian tertentu, sifatnya cukup rumit, banyak menguras tenaga dan pikiran, serta membutuhkan waktu yang lama dalam penyusunannya. Akan tetapi, bagi orang lain perencanaan dapat berarti suatu pekerjaan sehari – hari, tidak rumit, bahkan bisa saja orang tersebut tidak menyadari bahwa dia telah melakukan perencanaan. Definisi sederhana mengatakan bahwa perencanaan adalah menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah – langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

**W.H. Newman** dalam **Handayaningrat, Pengantar Studi Administrasi Dan Manajemen (1981:126)** memeberikan definisi sebagai berikut: “*planning is deciding in advance what is to be done, that is a plan, it is projected a course of action”.*perencanaan adalah keputusan apa yang akan dikerjakan untuk waktu yang akan dating, yaitu suatu rencana yang diproyeksikan dalam suatu tindakan.

Dalam hal ini perencanaan tidak hanya mengacu pada perencanaan manajemen tetapi perencanaan digunakan pada bidang ekonomi dan salah satu bentuk perencanaan ekonomi adalah perencanaan wilayah. Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan wilayah (termasuk perencanaan penggerakan didalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. **Tarigan** dalam bukunya yang berjudul **Perencanaan Pembangunan Wilayah (2005:3)** mengemukakan bahwa definisi perencanaan wilayah adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yag relevan, memeperkirakan faktor – faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah – langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. Perencanaan wilayah menurut **Miraza (2006}** mencakup pada berbagai segi kehidupan yang bersifat komprehensif dan satu sama lain saling bersentuhan, yang semuanya bermuara pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai faktor dalam kehidupan seperti ekonomi, politik dansosial serta budaya maupun adat istiadat berbaur dalam sebuah perencanaan wilayah, yang cukup kompleks. Semuaaktor harus dipertimbangkan dandiupayakan berjalan seiring dan saling mendukung. Perencanaan wilayah diharapkan akan dapat menciptakan sinergi bagi memperkuat posisi pengembangan dan pembangunan wilayah dari berbagai daerah sekitarnya. **Chaprin** mendefinisikan perencanaan wilayah (*Regional Planning*) sebagai upaya intervensi terhadap kekuatan-kekuatan pasar yang dalam konteks pengembangan wilayah yang memiliki tiga tujuan pokok yakni meminimalkan konflik kepentingan antar sektor, meningkatkan kemajuan sektoral dan membawa kemajuan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Tujuan perencanaan wilayah adalah menciptakan kehidupan yang efesien, nyaman, serta lestari dan pada tahap akhirnya menghasilkan rencana yang menetapkan lokasi dari berbaagai kegiatan yang direncanakan, baik oleh pihak pemerintah ataupun oleh pihak swasta. lokasi yang dipilih memberikan efesiensi dan keserasian lingkungan yang paling maksimal, setelah memperhatikan benturan kepentingan dari berbagai pihak. Sifat perencanaan wilayah yang sekaligus menunjukan manfaatnya, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perencanaan wilayah haruslah mampu menggambarkan proyeksi dari berbagai kegiatan ekonomi dan penggunaan lahan diwilayah tersebut dimasa yang akan datang.
2. Dapat membantu atau memandu para pelaku ekonomi untuk memilih kegiatan apa yang perlu dikembangkan di masa yang akan datang dan di mana lokasi kegiatan seperti itu masih diizinkan. Hal ini bisa mempercepat proses pembangunan karena investor mendapat kepastian hukum tentang lokasi usahanya dan menjamin keteraturan dan menjauhkan benturan kepentingan.
3. Sebagai bahan acuan bagi pemerintah untuk mengendalikan atau mengawasi arah pertumbuhan kegiatan ekonomi dan arah penggunaan lahan.
4. Sebagai landasan bagi rencana – rencana lainnya yang lebih sempit tetapi lebih detail, misalnya perencanaan sektoral dan perencanaan prasarana.
5. Lokasi itu sendiri dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan, penetapan kegiatan tertentu pada lokasi tertentu haruslah memberi nilai tambah maksimal bagi seluruh masyarakat, artinya dicapai suatu manfaat optimal dari lokasi tertentu.

Salah satu pendukung dalam mewujudkan perencanaan yang baik adalah perlunya partisipasi masyarakat, dalam ari partisipasi masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan Reverensi untuk konsep partisipasi masyarakat peneliti telah mengutipnya dari jurnal penelitian dengan topik **Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi** karya **Lily Sri Ulina Peranginangin (2014).**

Istilah partisipasi berasal dari bahasa Latin “*partisipare*” yang mempunyai arti “mengambil bagian” atau “turut serta”. Dari sudut terminologi menurut **Najih (2006)**, partisipasi diartikan sebagai suatu cara melakukan interaksi antara dua kelompok, yaitu kelompok yang selama ini tidak diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan *(non-elite)* dan kelompok yang selama ini melakukan pengambilan keputusan *(elite).*

**Sumarto (2009)** memberikan pengertian partisipasi sebagai berikut:

**Partisipasi memiliki makna suatu proses ketika warga (sebagai individu, kelompok sosial dan organisasi) mengambil peran serta ikut memengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka.**

**Kuswartojo dalam Sumarto (2009)** menyatakan partisipasi dapat mulai dari tahap menentukan arah mana yang akan dituju dan apa yang akan dihasilkan, yang biasanya disebut dengan tahap rumusan kebijakan dan rencana. Selanjutnya, diikuti dengan partisipasi pada tahap menentukan cara untuk mencapai tujuan dan mempertaruhkan sumber daya agar tujuan dapat dicapai, atau disebut juga tahap implementasi; akhirnya sampai pada tahap mencapai kesamaan pandangan tentang bagaimana memantau dan menilai hasilnya, yaitu tahap pemantauan dan evaluasi.

Pada dasarnya partisipasi memang bukan sekadar sosialisasi satu arah atau mobilisasi untuk melibatkan warga dalam suatu program pembangunan. Ini senada dengan yang disampaikan **Syahdan dalam Rohman (2009)** bahwa partisipasi sering disalah artikan sebagai kehadiran publik secara massal atau menggerakkan orang untuk berkumpul dan melakukan sesuatu (mobilisasi). Perlunya peran serta masyarakat diungkapkan **Hardjasoemantri dalam Najih (2006)**, yakni selain memberikan informasi yang berharga kepada para pengambil keputusan, peran serta masyarakat dapat mereduksi kemungkinan ketidaksediaan untuk menerima keputusan.

Secara politis terdapat dua bentuk peran serta yaitu peran serta horizontal dan vertikal. Peranserta horizontal adalah perilaku kolektif dal am upaya untuk mempengaruhi keputusan-keputusan kebijakan seperti pemungutan suara, kampanye, kegiatan kelompok kepentingan, dan *lobbying.* Peranserta vertikal mencakup segala kesempatan ketika anggota masyarakat mengembangkan hubungan tertentu dengan kelompok elit serta pejabat dan hubungan itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Contohnya, antara lain jaringan patron-klien dan wahana politik. Dalam kedua kasus tersebut perhatian besar masyarakat bukan terletak pada bagaimana mempengaruhi pemerintah melainkan lebih pada pengembangan hubungan tertentu yang dapat memberikan manfaat.

**Rusidi (1998: 14)** mengemukakan pengertian partisipasi sebagai:

**Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan yang diadakan oleh pihak lain (kelompok, asosiasi, organisasi pemerintahan, dan sebagainya), di mana keikutsertaannya dinyatakan atau diwujudkan dalam bentuk pencurahan pikiran, pencurahan material (dana) dan pencurahan tenaga sesuai dengan harapan kegiatan itu.**

Didalam penerapan partisipasi msyarakat diperlukan memahami masyarakat, karena sebelum dilakukan sosialisasi dengan masyarakat, maka kita harus memahami tindakan atau sikap masyarakat tersebut, dimana pemahaman masyarakat itu terdapat dalam konsep sosiologi.Sosiologi merupakan suatu ilmu yang masih muda, walau telah mengalami perkembangan yang cukup lama. Sejak manusia mengenal kebudayaan dan peradaban, masyarakat manusia sebagai proses pergaulan hidup telah menarik perhatian. Awal mulanya, orang – orang meninjau masyarakat hanya tertarik pada masalah – masalah yang menarik perhatian umum, seperti kejahatan, perang, kekuasaan golongan yang berkuasa, keagamaan, dan lain sebagainya. Dari pemikiran penilaian yang demikian itu, orang kemudian meningkat pada filsafat kemasyarkatan, dimana orang menguraikan harapan - harapan tentang susunan sertakehidupan masyarakat yang diingini atau yang ideal. Dengan demikian, timbul lah perumusan nilai – nilai dan kaidah – kaidah yang seharusnya ditaati oleh setiap manusia dalam hubungannya dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Yang dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang bahagia dan damai bagi semua manusia selama hidup didunia ini. Pemikiran – pemikiran terhadap masyarakat lambat laun mendapat bentuk sebagai suatu ilmu pengetahuan yang kemudian dinamakan sosiologi.

Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, tentang hubungan yang berlaku dan proses yang timbul dalam berbagai hubungan masyarakat. Sistem hubungan kemasyarakatan yang menjadi pokok bahasan sosiologi ialah hubungan kekerabatan, hubungan pergaulan, hubungan pekerjaan, hubungan formal dan informal dan hubungan sosial lainnya. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan – tindakan sosial. Tindakan sosial adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku orang lain. Sosiologi juga dapat dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala soaial (misalnya gejala ekonomi, gejala keluarga, gejala moral), sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala non – sosial, dan ilmu yang memepelajari ciri – ciri umum semua jenis gejala – gejala sosial lain.

Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu kata socius dan logos. Socius artinya kawan, logos artinya ilmu. Secara harfiah, sosiologi berarti ilmu tentang masyarakat. Sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat, yaitu tentang hubungan yang berlaku dan proses yang timbul dalam berbagai hubungan yang berlaku dan proses yang timbul dalam berbagai hubungan yang berlaku dan proses yang timbul dalam berbagai hubungan tersebut. Sistem hubungan kemasyarakatan yang menjadi pokok bahasan sosiologi ialah hubungan kekerabatan, hubungan pergaulan, hubungan pekerjaan, hubungan formal dan informal dan hubungan sosial lainnya. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia.

**Menurut William Kornblun** dalam **Sumardi Nyoman** “ **Sosiologi Pemerintahan” (2010:14)** berpendapat bahwa Sosiologi adalah suatu upaya ilmiah untuk mempelajari masyarakat dan prilaku sosial anggotanya dan menjadikan masyarakat yang bersangkutan dalam berbagai kelompok dan kondisi.

Sosiologi mempelajari kehidupan dan prilaku, terutama dalam kaitannya dengan suatu sistem sosial dan bagaimana sistem tersebut mempengaruhi orang dan bagaimana pula orang yang terlibat didalamnya mempengaruhi sistem tersebut. Menurut sifat hakikatnya, maka dapat ditetapkan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan ilmiah yang telah berdiri sendiri dan mempunyai obyek studi tersendiri pula. Objek dari sosiologi adalah masyarakat.

Menurut **Pitirim Sorokin (1928)** dalam **Soejono Soekanto “Sosiologi Suatu Pengantar”(2012:17)** mengatakan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari:

1. **Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala – gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik dan lain sebagianya)**
2. **Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala – gejala nonsosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya)**
3. **Ciri – ciri umum semua jenis gejala – gejala sosial**

Dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang membicarakan apa yang sedang terjadi saat ini, khususnya pola – pola hubungan dalam masyarakat serta berusaha mencari pengertian – pengertian umum, rasional, empiris serta bersifat umum.

Sosiologi merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi juga merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dengan ciri utamanya adalah seperti berikut:

1. Sosiologi bersifat empiris, artinya bahwa ilmu pengetahuan tersebut didasarkan pada observasi terhadap kenyataan dan akal sehat serta hasilnya tidak bersifat spekulatif.
2. Sosiologi bersifat teoritis, yaitu ilmu pengetahuan tersebut selalu berusaha untuk menyusun abstraksi dari hasil – hasil observasi. Abstraksi tersebut merupakan kerangka dari unsur – unsur yang tersusun secara logis serta bertujuan untuk menjelaskan hubungan – hubungan sebab akibat sehingga menjadi teori.
3. Sosiologi bersifat kumulatif, artinya bahwa teori – teori sosiologi dibentuk atas dasar teori – teori yang sudah ada dalam arti memperbaiki, memperluas, serta memperhalus teori – teori lama.
4. Sosiologi bersifat nonetis, yaitu yang dipersoalkan bukanlah buruk baiknya fakta tertentu, tetapi tujuannya adalah untuk menjelaskan fakta tersebut secara analitis.

Sebagaimana halnya dengan ilmu – ilmu sosial, objek sosiologi adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan manusia didalam masyarakat. Agak sukar untuk memberikan suatu batasan tentang masyarakat karena istilah masyarakat terlalu banyak mencakup berbagai faktor sehingga kalaupun diberikan suatu definisi yang berusaha mencakup keseluruhannya, masih ada juga yang tidak memenuhi unsur – unsurnya. Menurut **Selo Soemardjan** menyatakan bahwa masyarakat adalah orang – orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat mencakup beberapa unsur, diantaranya:

1. **Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama. Didalam ilmu sosial tak ada ukuran mutlak ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimnya adalah dua orang yang hidup bersama.**
2. **Bercampur untuk waktu yang lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda – benda mati seperti umpanya kursi atau meja. Karena dengan berkumpulnya manusia, maka akan timbul manusia - manusia baru. Manusia dapat bercakap, merasa dan mengerti juga memiliki keinginan – keinginan.**
3. **Mereka sadar bahwa mereka merupakan kesatuan**
4. **Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan lainnya.**

Dengan demikian, suatu masyarakat sebenarnya merupakan sistem adaptif, karena masyarakat merupakan wadah untuk memenuhi berbagai kepentingan dan tentunya juga untuk dapat bertahan.

Berbicara mengenai masyarakat, sosiologi memang selalu berkaitan dengan masyarakat untuk memahami bagaimana sikap masyarakat termasuk tindakan – tindakannya, salah satu nya tindakan masyarakat yaitu berhak memberi rasa penilaian terhadap segala sesuatu, baik melalui dengan cara melihat ataupun mendengarnya, hal itu dapat dinamakan persepsi, untuk itu peneliti akan membahas konsep persepsi yang ditelah dikutip melalui penelitian sebelumnya dengan topik **Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Diy** karya **Herianto (2014)**.

Posisi masyarakat bukan hanya sekedar penikmat atau penerima layanan semata, masyarakat juga memiliki posisi sebagai evaluator terhadap layanan yang diberikan pemerintah. Masyarakat yang menerima layanan kemudian menilai pelayanan dan kinerja yang diberikan si pemberi layanan, kemudian mereka mengambil kesimpulan terhadap layanan yang diterima oleh mereka, memuaskan atau tidak memuaskan, baik atau buruk, sesuai dengan standar pelayanan atau tidak tidak sesuai dengan standar, terlepas dari latar belakang masyarakat tersebut serta paham atau tidak akan standar pelayanan yang telah ditentukan oleh pemerintah sendiri. Kesimpulan yang diambil masyarakat tersebut dinamakan persepsi.

Kehidupan bermasyarakat tidak akan lepas dari persepsi masyarakat itu sendiri. Persepsi merupakan tanggapan atau penerimaan langsung dari seseorang. Menurut **Jalaludin Rackhmat (2011: 50)** persepsi merupakan pengalaman tentang obyek, peristiwa, atau hubungan - hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan menurut **Bimo Walgito (2002: 87)** persepsi merupakan suatu proses yang didahului penginderaan yaitu proses stimulus oleh individu melalui proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diterus kan dan diproses selanjutnya merupakan proses persepsi. Setelah membahas pengertian persepsi, persepsi memiliki teori syarat persepsi , garis besar persepsi manusia, dan faktor – faktor persepsi. Teori tersebut dikutip dari jurnal penelitian sebelumnya dengan topik **Persepsi Masyarakat Tehadap Kualitas Pelayanan Publik Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara (Studi Pada kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, KotaTanjungpinang)**

Jadi persepsi masyarakat menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja dan layanan yang diberikan oleh pemerintah/organisasi bersangkutan. Baik buruk dan positif tidaknya persepsi masyarakat terhadap organisasi bersangkutan menjadi acuan atas pelayanan yang diberikan aparat organisasi itu sendiri, apakah pemberi layanan sudah melayani atau melaksanakan pekerjaanya secara maksimal atau sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

**Dedi Mulyana (2005:171)** menyebutkan secara garis besar persepsi manusia dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. **Persepsi terhadap obyek (lingkungan fisik); sifat-sifat luar,sedangkan persepsi terhadap orang menaggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya). Orang akan mempersepsi anda pada saat anda mempersepsi mereka. Dengan kata lain, persepsi terhadap manusia bersifat interaktif.**
2. **Persepsi terhadap manusia; melalui lambang-lambang fisik, sedangkan persepsi terhadap orang melalui lambang – lambang verbal dan nonverbal. Orang lebih aktif daripada kebanyakan obyek dan lebih sulit diramalkan. Dengan demikian persepsi merupakan penilaian seseorang terhadap suatu hal baik melalui penglihatan maupun pendengaran.**

Setelah membahas persepsi, untuk konsep selanjutnya ada pembangunan, ruang terbuka hijau dan tata ruang. Ketiga konsep ini berkaitan dengan topik peneliti yaitu mengenai taman, maka sebelum membahas konsep taman, terlebih dahulu peneliti akan membahas ketiga konsep tersebut dan dimulai dari konsep pembangunan.

Banyak orang yang menginterpretasikan pembangunan dengan pembangunan jalan layang, gedung – gedung bertingkat, pembangunan kota – kota besar, dan sebagainya. Padahal, arti pembangunan yang dicita – citakan adalah pembangunan masyarakat yang adil dan makmur. Keadilan akan menuju pada kemakmuran, tetapi belum tentu sebaliknya. Yang utama adalah pembangunan masyarakat (manusia), sedangkan pembangunan fisik hanyalah pertanda bahwa sebagian manusianya makmur. Hakikat pembangan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Ini berarti bahwa pembangunan mencakup: pertama, kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, dan lain – lain; ke dua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkadilan sosial.

Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation – building) Karena luasnya ruang lingkup pembangunan maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap tetapi simultan, pada tiap – tiap tahap diharap dapat dicapi keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat, dengan kadar keadilan sosial yang meningkat. Dengan begitu, pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus – menerus.

Hakikatnya pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa menyeluruh, demi mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk bisa membangun lebih baik, masyarakat harus berpendidikan dan bermoral baik. Untuk melakukan pembangunan yang lebih efektif masyarakat perlu mempelajari sejarah bangsa – bangsa. Berikut dua definisi dari para ahli yang telah peneliti kutip dari jurnal penelitian dengan topik **Revitalisasi Forum Musrenbang sebagai Wahana Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Daerah** karya **Akadun (2011).**

**Siagian (1999:4)** memberikan pengertian pembangunan sebagai berikut:

**Pembangunan merupakan “rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara/bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation bulding)*.”**

**Surna dalam Iskandar (2005)** memberikan pengertian pembangunan sebagai:

**Pembangunan merupakan kegiatan-kegiatan yang direncanakan dalam mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untukkelangsungan hidup manusia.**

Pembangunan dalam suatu negara sangat berkaitan erat dengan pemerintah dalam perumusan kebijakan maupun implementasi kebijakan. Administrasi Negara dalam hal inipemerintah tidak hanya menyelenggarakan tugas rutin saja tetapi juga menyelenggarakan tugas – tugas pembangunan. Dalam konteksnya yang luas tersebut, pembangunan mempunyai beberapa pengertian, yang didasarkan pada sudut pandang yang berbeda – beda pula. Beberapa pengertian pembangunan tersebut ialah:

1. Pembangunan adalah perubahan

Perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang. Kondisi yang lebih baik itu harus dilihat dalam cakupan keseluruhan segi kehidupan bernegara dan bermasyarakat, oleh karenanya tidak hanya baik dalam arti peningkatan taraf hidup saja, akan tetapi juga dalam segi – segi kehidupan yang lainnya.

1. Pembangunan adalah pertumbuhan

Yang dimaksud pertumbuhan ialah kemampuan suatu negara untuk terus selalu berkembang baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Cakupannya pun adalah seluruh segi kehidupan. Sebagai wujud implementasinya, tak ada satu pun segi kehidupan yang luput dari usaha pembangunan.

1. Pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan

Keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang diharapkan akan terus berlangsung, tidak akan terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Secara konseptual maupun operasional, tujuan dan berbagai kegiatan dengan sengaja ditentukan dalam seluruh potensi serta kekuatan nasional. Suatu kondisi ideal yang merupakan salah satu sasaran pembangunan ialah apabila kesadaran itu terdapat dalam diri seluruh warga masyarakat pada semua lapisan dalam tingkatan dan tidak terbatas hanya kelompok – kelompok tertentu dalam masyarakat.

1. Pembangunan adalah sesuatu rencana yang tersusun secara rapi

Perencanaan mutlak dilakukan oleh dan dalam setiap organisasi, apa pun tujuannya, apa pun kegiatannya tanpa melihat apakah organisasi bersangkutan besar atau kecil. Negara merupakan organisasi, sehingga dalam usaha pencapaian tujuan pembangunan para pimpinanya mau tidak mau pasti terlibat dalam kegiatan – kegiatan perencanaan.

1. Pembangunan adalah cita – cita akhir dari perjuangan negara atau bangsa

Pertumbuhan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang terpusat pada daerah perkotaan memacu terjadinya peningkatanjumlah penduduk, dengan luas lahan yang terbatas akan berakibat terhadap menurunnyakualitas lingkungan.

Pembangunan memiliki sifat berkelanjutan, karna pembangunan merupakan pertumbuhan atau perubahan baik secara terencana maupun tidak yang diarahkan untuk ke hal yang lebih baik yakni untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Perkembangan masyarakat yang ada di dunia tumbuh dengan pesat dari waktu ke waktu. Jumlah penduduk disuatu negara yang terus meningkat akan menuntut pemerintah negaranya untuk selalu siap memenuhi segala sarana dan pemenuhan hidup rakyatnya baik masyarakat pedesaan maupun masyarakat perkotaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat memberikan implikasi pada tingginya tekanan terhadap pemanfaatan ruang terkadang semakin sempitnya ruang untuk bergerak. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian khusus, terutama terkait dengan pneyediaan kawasan hunian , fasilitas umum dan sosial serta ruang terbuka publik diperkotaan.

Sebagai salah satu unsur kota yang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis, maka betapa sempitnya dan kecilnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang ada, termasuk halaman taman bangunan pribadi, seharusnya dimanfaatkan sebagai ruang hijau yang ditanami tumbuh – tumbuhan. Berdasarkan konferensi Tingkat Tinggi (KTT) **Bumi de Janeiro, Brazil (1992)** dan dipertegas lagi pada KTT **Johannes burg,** disepakati bersama bahwa sebuah kota idealnya memiliki luas Ruang terbuka Hijau minimal 30 persen (%) dari total luas kota. Tentu saja angka ini bukan merupakan patokan mati. Penetapan luas ruang terbuka hijau kota harus berdasar pula pada studi eksistensi sumber daya manusia penghuninya. Penetapan besaran luas ini bisa juga disebut sebagai bagian dari pengembangan Ruang Terbuka Hijau kota.

**Menurut Purnomohadi (1994:21)** definisi Ruang Terbuka Hijau sebagai berikut:

**Ruang Terbuka Hijau adalah sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang didalamanya terdapat tumbuhan hijau berkayu dan tahunan (*perennial woody plants*) dengan pepohonan sebgai tumbuhan perinci utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan dan tumbuhan penutup tanah lainnya, sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan.**

Secara fisik Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat dibedakan menjadi RTH alami yang berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman – taman nasional, maupun RTH non – alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, dan kebun bunga. Multi fungsi penting RTH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi ekologis, sosial budaya, arsitektural dan ekonomi. Manfaat RTH secara langsung atau tidak langsung sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi “alami” ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai faktor. Berlangsungnya ekologis alami didalam lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Dengan adanya RTH sebagai paru – paru kota, maka dengan sendirinya akan terbentuk iklim yang sejuk dan nyaman. Kenyamanan ini ditemukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor – faktor suhu udara, cahaya dan pergerakan angin.

Adapun fungsi Ruang Terbuka Hijau yang secara umum dibedakan menjadi:

1. Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberi jaminaan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara ( paru – paru kota), pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lencer, sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyedia habitat satwa, penyerap (pengelolah) polutan media udara, air dan tanah, serta penahan angin.
2. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) daan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya local, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan dan penelitian.
3. Ekosistem perkotaan, produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain – lain.
4. Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik skala maupun skala besar.

Bentuk – bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lain – lain. Secara sosial- budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tanda kota yang berbudaya. Bentuk RTH yang berfungsi sosial – budaya antara lain kebun raya, taman – taman dan sebagainya. Oleh karena itu berikut pembahasan mengenai taman secara umum

Menurut **Kamus Bahasa Indonesia**, taman adalah kebun yang ditanami dengan bunga - bunga (tempat bersenang - senang) atau tempat yang menyenangkan. Taman dapat diartikan sebagai tanaman yang ditanam dan ditata sedemikian rupa, baik sebagian maupun semuanya hasil rekayasa manusia untuk mendapatkan komposisi tertentu yang indah. **Menurut Arifin (1991),** taman kota merupakan salah satu kawasan ruang terbuka hijau lengkap dengan segala fasilitasnya sesuai untuk pemenuhan kebutuhan rekreasi masyarakat setempat, baik rekreasi aktif maupun pasif. **Menurut Irwan** dalam **Sasongko (2002),** fungsi taman kota dikelompokan menjaditiga fungsi sebagai berikut:

1. **Fungsi Lanskap, meliputi**
2. **Fungsi fisik, yaitu vegetasi berfungsi untuk melindungi dari kondisi fisik alami seperti terhadap angin dan sinar matahari.**
3. **Fungsi sosial, penataan unsur - unsur yang berbeda seperti bangku, telepon, air mancur dan patung ditata sedemikian rupa sehingga bisa memberikan tempat interaksi sosial yang sangat produktif (Carmona, 2003). Taman kota dengan aneka vegetasi memiliki nilai – nilai ilmiah sehingga dapat dijadikan sebagai laboratorium hidup untuk sarana pendidikan dan penelitian.**
4. **Fungsi Pelestarian Lingkungan**
5. **Menyegarkan udara atau sebagai paru – paru kota, yaitu dengan menyerap Karbon Dioksida (CO2) dan mengeluarkan Oksigen (O2) dalam proses fotosintesis.**
6. **Menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembaban, pepohonan mampu memperbaiki suhu kota melalui evaporasi dan transpirasi (evapotranspirasi), karena sebatang pohon secara soliter mampu menguapkan air rata – rata 400 liter/hari, jika air tanah cukup tersedia dalam kapasitas lapang.**
7. **Sebagai habitat satwa, vegetasi dapat menciptakan habitat bagi makhluk hidup lainnya, misal burung. Burung sebagai komponen ekosistem mempunyai peranan penting, di antaranya adalah pengontrol populasi serangga, membantu penyerbukan bunga dan pemencaran biji .**
8. **Penyangga dan perlindungan permukaan air tanah dari erosi, sebagai penyangga dan perlindungan tanah dari air hujan dan angin juga untuk penyediaan air tanah dan pencegah erosi.**
9. **Pengendalian dan mengurangi polusi udara dan limbah, debu, atau partikel yang terdiri dari beberapa komponen zat pencemar.**
10. **Tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator. Taman kota juga berfungsi sebagai tempat pelestarian plasma nutfah dan bioindikator dari timbulnya masalah lingkungan karena tumbuhan tertentu akan memberikan reaksi tertentu terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya.**
11. **Menyuburkan tanah. Sisa – sisa tumbuhan akan dibusukkan oleh mikroorganisme dalam tanah dan akhirnya terurai menjadi humus atau materi yang merupakan sumber hara mineral bagi tumbuhan.**
12. **Fungsi Estetika**

**Estetika dapat dilihat dari penampilan vegetasi dalam taman kota secara individu maupun dalam bentuk asosiasi. Vegetasi memberikan kesan alami, khususnya lingkungan perkotaan, dimana vegetasi memberikan kesegaran visual terhadap lingkungan yang serba keras.**

Taman kota hadir sebagai lokasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan rekreasi aktif maupun pasif. Keberadaan taman di dalam kota merupakan respon langsung terhadap tuntutan spesifik dari masyarakat maupun dari kota itu sendiri. Perkembangan taman kota pun tidak bisa dipisahkan dari pola perkembangan kota secara keseluruhan. Harga tanah yang kian tinggi dan sempitnya ruang terbuka yang tersisa dalam kota, mau tidak mau harus ada usaha untuk meningkatkan kegunaan taman secara intensif **(Arifin, 1991).** Taman kota merupakan salah satu kebutuhan bagi masyarakat. Manusia tidak hanya membutuhkan sandang, pangan dan papan saja, namun manusia juga membutuhkan ruang untuk relaksasi dan kontak sosial, seperti teori hirarki kebutuhan yang dikemukan oleh **Abraham H. Maslow**.

* 1. **Kerangka Pemikiran**

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**

PERDA Kota Bandung No. 07 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Reformasi Birokrasi

Good Governance

Perencanaan Wilayah

Akuntabilitas Publik

Pertanggung jawaban

Transparansi

Tanggung jawab

Responsivitas

Pengendalian

Keberhasilan Pengelolaan Taman Lansia Berbasis Akuntabilitas Publik

**2.3. Proposisi**

Agar Akuntabilitas dalam pengelolaan Taman Lansia Kota Bandung terwujud dengan baik maka dapat ditentukan melalui dimensi akuntabilitas yaitu Transparansi, Pertanggungjawaban, Pengendalian, tanggungjawab, dan Responsivitas.